

Monitoring dan Evaluasi Pelatihan Pembinaan Kesadaran Bela Negara Lingkup Pekerjaan bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Lingkungan Hidup

Inge Salsabila Suryaman¹, Fitri Rosvianti², dan Sagita Ludyna Sanosie³

¹Pusdiklat Bela Negara BPSDM Pertahanan Kemhan, ingesabiellawork@gmail.com

²Pusdiklat Bela Negara BPSDM Pertahanan Kemhan, fitrirosvianti@gmail.com

³Pusdiklat Bela Negara BPSDM Pertahanan Kemhan, sagitaludyna@gmail.com

ABSTRAK

Pelatihan Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN) memiliki peran strategis dalam pembentukan karakter Bela Negara untuk karyawan di lingkup pekerjaan. Monitoring dan Evaluasi merupakan proses sistematis untuk mengidentifikasi efektivitas dan kekuatan program Pelatihan PKBN yang telah dilaksanakan. Pemerintah dalam upaya mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Maju, Sejahtera, Berdaulat, dan Berdaya Saing Global berkomitmen dengan visi Indonesia Emas 2045 sebagai cita-cita besar Negara Indonesia. Maka salah satu upaya untuk mewujudkan visi tersebut maka diperlukannya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki karakter bela negara sebagaimana tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 115/2022 tentang Rencana Induk PKBN 2020-2044. Sehingga terbentuknya SDM yang profesional dan juga memiliki kecintaan terhadap tanah air, dengan kesadarannya untuk mampu mempertahankan negara dari berbagai ancaman yang dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa. Pelaksanaan PKBN bagi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sangat relevan dengan mandat dan peran strategisnya dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup serta memastikan keberlanjutan sumber daya alam Indonesia. Hal tersebut menjadi urgensi tersendiri, dimana KLHK dianggap sebagai garda terdepan dalam pengelolaan lingkungan, aparatur KLHK dihadapkan pada tantangan multidimensional yang tidak hanya bersifat teknis dan ekologis, tetapi juga ideologis dan nasional. Ancaman terhadap kedaulatan negara tidak lagi hanya datang dari aspek militer, tetapi juga dari degradasi lingkungan, eksploitasi sumber daya alam yang tidak berkelanjutan, serta dampak perubahan iklim global yang dapat melemahkan ketahanan nasional. Metode dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan proses analisis data penyelenggaraan Pelatihan Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN) yang dilaksanakan di Pusat Pendidikan dan Latihan (Pusdiklat) Bela Negara Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Pertahanan Kementerian Pertahanan (Kemhan). Teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam, observasi partisipatif, serta analisis dokumen Evaluasi Penyelenggaraan Pelatihan PKBN Lingkup Pekerjaan Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Lingkungan Hidup Tahun 2025 di Pusat Pendidikan dan Latihan (Pusdiklat) Bela Negara BPSDM Pertahanan Kemhan. Berdasarkan hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pendidikan PKBN bukan sekadar kebutuhan kelembagaan, melainkan investasi strategis jangka panjang bagi stabilitas, kedaulatan, dan ketahanan nasional Indonesia di masa depan. Oleh karena itu, pelaksanaan program PKBN harus terus ditingkatkan dengan pendekatan yang adaptif dan relevan terhadap perkembangan zaman serta tantangan global yang semakin kompleks. Hal ini penting untuk membentuk masyarakat yang tidak hanya produktif, tetapi juga memiliki rasa tanggung jawab sosial dan nasionalisme yang tinggi.

Kata Kunci: evaluasi, pelatihan, bela, negara

ABSTRACT

The National State Defence Development Training (PKBN) plays a strategic role in shaping the National Defence character of employees in the workplace. Monitoring and evaluation is a systematic process that identifies the effectiveness and strengths of the PKBN program that has been implemented. The government, in its efforts to realize an advanced, prosperous, sovereign, and globally competitive Unitary State of the Republic of Indonesia, is committed to the vision of "Golden Indonesia 2045" as the nation's grand ideal. One crucial aspect of realizing this vision is the need for quality Human Resources (HR) who possess a strong national defence character, as outlined in Presidential Decree No. 115/2022 regarding the 2020-2044 PKBN Master Plan. This effort aims to develop professional HR who not only excel in their respective fields but also have a deep sense of patriotism and awareness of the importance of defending the nation from various threats that may jeopardize its sovereignty, territorial integrity, and national security. The implementation of PKBN for the Ministry of Environment and Forestry (KLHK) is highly relevant to its mandate and strategic role in preserving the environment and ensuring the sustainability of Indonesia's natural resources. This

establishes a distinct urgency, as KLHK is considered the frontline institution in environmental management. Its personnel face multidimensional challenges that are not only technical and ecological in nature but also ideological and national in scope. Threats to national sovereignty today no longer come solely from military aspects, but also from environmental degradation, unsustainable exploitation of natural resources, and the impacts of global climate change, all of which can weaken national resilience. The method in this research is a qualitative method with a data analysis process of the implementation of the National Defense Awareness Development Training (PKBN) held at the National Defense Training Center of the Ministry of Defense's Human Resources Development Agency (BPSDM). Data collection techniques include in-depth interviews, participatory observation, and document analysis of the Evaluation of the Implementation of the PKBN Training Scope of Work for ASN of the Ministry of Environment in 2025 at the National Defense Training Center of the Ministry of Defense's Human Resources Development Agency (BPSDM). The findings of this study conclude that PKBN education is not merely an institutional necessity but a long-term strategic investment in Indonesia's stability, sovereignty, and national resilience. Therefore, continuous improvement of the PKBN program with an adaptive and relevant approach to evolving global challenges is essential to cultivate a society that is productive, responsible, and nationally conscious.

Keywords: evaluation, training, defence, state

PENDAHULUAN

Dalam konteks pembangunan karakter kebangsaan, pelatihan Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN) memegang peran strategis sebagai sarana untuk menanamkan serta memperkuat nilai-nilai dasar bela negara. Upaya ini menjadi semakin penting di tengah dinamika globalisasi dan perubahan sosial yang cepat, yang berpotensi melemahkan semangat nasionalisme dan kecintaan terhadap tanah air. Oleh karena itu, kualitas dan mutu pelaksanaan pelatihan PKBN menjadi faktor krusial yang menentukan efektivitas internalisasi nilai-nilai tersebut kepada peserta pelatihan.

Dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks dan dinamis, peran strategis pelatihan dalam pembentukan karakter Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi semakin penting. Hal itu karena pendidikan dan pelatihan (diklat) memegang peranan vital dalam membentuk kesadaran generasi muda untuk menjaga keutuhan bangsa (Hanum, Dewi, & Agustin, 2022). Salah satu bentuk pelatihan yang berfokus pada penguatan karakter kebangsaan adalah Pelatihan Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN), yang ditujukan tidak hanya bagi kalangan militer, tetapi juga bagi karyawan di lingkup pekerjaan sipil dan profesional. Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 30 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menegaskan hak sekaligus kewajiban warga negara dalam membela negara. Selain itu, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara menegaskan bahwa bela negara tidak hanya berkaitan dengan keterlibatan militer, tetapi juga mencakup peran serta seluruh warga negara dalam bentuk nonmiliter. Peran tersebut dapat diwujudkan melalui jalur pendidikan, pengabdian kepada masyarakat, serta profesionalisme di bidang

pekerjaan masing-masing. Semangat tersebut seirama dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang menekankan pentingnya pembentukan watak, karakter, dan peradaban bangsa. Selain itu, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menegaskan bahwa aparatur sipil negara dituntut untuk memiliki integritas, profesionalitas, serta menjaga netralitas dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Program ini dirancang sebagai upaya sistematis untuk membentuk SDM yang tidak hanya kompeten secara profesional, tetapi juga memiliki kesadaran dan semangat bela negara yang tinggi. Sejalan dengan visi besar Indonesia Emas 2045, pemerintah menegaskan pentingnya membangun SDM unggul yang memiliki integritas, nasionalisme, dan kesiapsiagaan dalam menghadapi berbagai bentuk ancaman terhadap kedaulatan dan keutuhan negara. Komitmen ini dituangkan dalam Keputusan Presiden (Keppres) No. 115 Tahun 2022 tentang Rencana Induk PKBN Tahun 2020–2044, yang menjadi pedoman nasional dalam penguatan karakter bela negara secara terencana dan berkelanjutan. Peraturan ini juga menetapkan dasar dan kerangka bagi pemerintah dalam melaksanakan dan mengawasi program-program bela negara demi menumbuhkan kesadaran dan sikap perilaku bela negara pada warga negara.

Rencana Induk PKBN Tahun 2020-2044 tersebut disusun sebagai pedoman jangka panjang untuk membangun sikap mental dan karakter bela negara warga Indonesia secara bertahap dan berkesinambungan. Tahap pertama (2020-2024) difokuskan pada penataan, yaitu pembangunan sikap mental dan karakter bela negara di lingkungan pendidikan, masyarakat, dan pekerjaan. Tahap kedua (2025-2029) adalah penguatan, yakni memperkuat sikap bela negara di ketiga lingkup utama tersebut. Selanjutnya

pada tahap ketiga (2030-2034) dilakukan pengembangan dengan memperluas dan memperdalam Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN). Pada tahap keempat (2035-2039) dilakukan pemantapan agar sikap mental dan karakter bela negara menjadi tangguh di seluruh aspek kehidupan. Tahap akhir (2040-2044) merupakan pencapaian tertinggi, yaitu terwujudnya sikap mental dan karakter bela negara pada seluruh warga negara Indonesia yang memiliki daya tangkal kesiapsiagaan menghadapi segala bentuk ancaman. Keseluruhan tahapan ini bermuara pada terwujudnya SDM unggul yang berkarakter kuat dan siap menghadapi tantangan global dalam rangka mencapai Indonesia Emas 2025.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 ayat (3) disebutkan bahwa dalam usaha bela negara, seluruh warga negara berhak mendapatkan pendidikan kewarganegaraan yang dilaksanakan melalui Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN), yang mana saat ini Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Bela Negara Badan pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Pertahanan Kementerian Pertahanan menjadi salah satu penyelenggara program tersebut. Dalam penyelenggaraan program pendidikan PKBN, evaluasi mutu Pendidikan dan Latihan (Diklat) PKBN menjadi aspek penting dalam memastikan efektivitas program yang dijalankan. Melalui proses evaluasi yang sistematis, dapat diidentifikasi kekuatan, kelemahan, serta potensi pengembangan program di masa depan. Evaluasi ini juga berfungsi sebagai tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan PKBN dalam menumbuhkan semangat cinta tanah air dan kesiapan mempertahankan negara di kalangan peserta, khususnya di lingkungan kerja.

Penguatan karakter bela negara sebagaimana diamanatkan dalam rencana induk PKBN dilaksanakan secara bertahap pada tiga lingkup utama, yakni pendidikan, masyarakat, dan pekerjaan. Lingkup pendidikan menekankan penanaman nilai sejak dini, lingkup masyarakat mendorong partisipasi aktif warga, dan lingkup pekerjaan menumbuhkan disiplin serta profesionalisme bela negara (Kementerian Pertahanan RI, 2021). Pelaksanaannya memerlukan sinergi lintas sektor antara kementerian, lembaga pemerintah, TNI, Polri, serta pemerintah daerah agar tercipta integrasi yang menyeluruh. Oleh karena itu, pelatihan

PKBN tidak hanya dipandang sebagai kebutuhan kelembagaan, tetapi juga sebagai investasi strategis jangka panjang bagi stabilitas, kedaulatan, dan ketahanan nasional Indonesia.

Lingkup pekerjaan dalam pelaksanaan pelatihan PKBN mencakup berbagai aspek yang saling berkaitan, mulai dari perencanaan materi, metode penyampaian, hingga evaluasi hasil pelatihan. Evaluasi mutu pelatihan, dalam hal ini, bukan hanya menjadi alat ukur pencapaian tujuan pelatihan, tetapi juga menjadi dasar bagi perbaikan dan pengembangan program ke depan. Melalui evaluasi yang komprehensif dan sistematis, dapat diidentifikasi sejauh mana pelatihan mampu membentuk sikap dan perilaku peserta sesuai dengan nilai dasar bela negara.

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji peran strategis pelatihan PKBN dari perspektif evaluasi mutu, serta bagaimana aspek evaluatif tersebut berkontribusi dalam memperkuat nilai-nilai dasar bela negara secara berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Metode dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan proses analisis data penyelenggaraan Pelatihan Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN) yang dilaksanakan di Pusdiklat Bela Negara BPSDM Pertahanan Kemhan dipilih karena data tersebut memiliki relevansi strategis dalam menggambarkan efektivitas pelaksanaan program pembinaan karakter dan kesadaran bela negara yang menjadi bagian dari kebijakan ketahanan nasional. Data ini bersumber dari lembaga pelaksana utama di bawah Kementerian Pertahanan yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab langsung dalam pendidikan bela negara, sehingga keabsahan dan kredibilitasnya tinggi. Pelaksanaan *monitoring* menggunakan metode pengawasan langsung melalui observasi lapangan dan keterlibatan aktif pelatih serta instruktur, dan pengawasan tidak langsung melalui dokumentasi, laporan, serta data hasil belajar. Model analisis dalam penelitian ini menggunakan model analisis Spradley (1980) yang terdiri dari tahap analisis domain, analisis taksonomi, analisis komponensial, dan analisis tema budaya (Mertajaya, 2020). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif parsipatoris dimana sumber data adalah dokumen Evaluasi Penyelenggaraan Pelatihan PKBN Lingkup Pekerjaan bagi ASN Kementerian

Lingkungan Hidup Tahun 2025 di Pusdiklat Bela Negara BPSDM Pertahanan Kemhan dengan jumlah peserta sebanyak 71 siswa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembinaan Kesadaran Bela Negara melalui program pendidikan dan pelatihan tidak berdiri sendiri, melainkan lahir dari dasar hukum yang terintegrasi dalam berbagai regulasi nasional. Konstitusi Republik Indonesia Tahun 1945, misalnya pada Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 30 ayat (1)–(2), tidak hanya mengakui hak warga negara untuk berperan dalam pembelaan negara, tetapi juga ditujukan sebagai kewajiban. Prinsip ini kemudian dijabarkan lebih lanjut melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara, yang menegaskan bahwa bela negara tidak terbatas pada dimensi kemiliteran. Partisipasi masyarakat dapat diwujudkan melalui sektor pendidikan, pengabdian di lingkungan sosial, hingga penguatan profesionalisme di tempat kerja. Perspektif tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menggarisbawahi fungsi pendidikan sebagai media pembentukan karakter, pembangunan peradaban, dan penguatan nilai kebangsaan. Ketentuan serupa juga tampak pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara serta Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara, yang menuntut aparatur sipil negara untuk memelihara integritas, profesionalisme, dan netralitas sambil meningkatkan kompetensinya melalui pendidikan dan pelatihan berbasis nilai-nilai kebangsaan. Seluruh perangkat hukum tersebut dioperasionalkan melalui kebijakan yang lebih teknis, seperti Keputusan Presiden Nomor 115 Tahun 2022 tentang Rencana Induk Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN) Tahun 2020–2044, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Bela Negara, serta Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 32 Tahun 2016 yang memuat pedoman pelaksanaannya. Dengan demikian, Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN) tidak hanya memiliki legitimasi hukum, tetapi juga memiliki arah kebijakan yang jelas dan menyeluruh. Keseluruhan regulasi ini

bukan hanya memberi arahan strategis, melainkan juga memastikan bahwa program bela negara diselenggarakan secara terstruktur, terpadu, serta berkesinambungan sesuai kebutuhan bangsa.

Merujuk pada peraturan-peraturan di atas, berdasarkan Keputusan Kabadiklat Kemhan Nomor Kep/769/XII/2024 tanggal 21 Maret 2024 tentang Program Kerja dan Anggaran Pusdiklat Bela Negara Kabadiklat Kemhan TA. 2025 Evaluasi penyelenggaraan Pelatihan Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN) di lingkup pekerjaan menunjukkan hasil bahwa program ini telah dijalankan sesuai arah kebijakan dan prioritas strategis sebagaimana tertuang dalam Kep Kabadiklat. Atas dasar Surat Koordinator Sekretariat Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor S.75/E.3/JFT/PEG.11.1/B/VI/2025 tanggal 20 Juni 2025 perihal *Permohonan Fasilitas Pendidikan dan Pelatihan Bela Negara*, telah dilaksanakan kegiatan Pelatihan Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN) dengan fokus pada *Monitoring dan Evaluasi Pelatihan Pembinaan Kesadaran Bela Negara Lingkup Pekerjaan Bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Lingkungan Hidup dalam Memperkuat Nilai Dasar Bela Negara*. Kegiatan ini bertujuan untuk membentuk ASN yang tidak hanya profesional dalam tugasnya, tetapi juga memiliki karakter kebangsaan yang kuat serta kesadaran bela negara yang tinggi dalam mendukung tugas dan fungsinya di bidang lingkungan hidup.

Monitoring dan *Evaluasi* mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, serta capaian *output* dan *outcome*, yang secara umum telah mencerminkan komitmen terhadap penguatan nilai dasar bela negara di lingkungan pekerjaan. Namun demikian, beberapa aspek seperti peningkatan kompetensi fasilitator, optimalisasi metode pembelajaran berbasis partisipatif, dan pemantauan pasca-pelatihan masih memerlukan perbaikan berkelanjutan untuk memastikan efektivitas program sebagai investasi strategis dalam membentuk SDM unggul dan berkarakter bela negara.

Untuk mendukung capaian tersebut, *monitoring* dan *evaluasi* secara lebih terperinci juga dilakukan pada level kegiatan teknis, khususnya pada sesi ruang kelas sebagai salah satu komponen utama dalam pelaksanaan Pelatihan PKBN. *Monitoring* menurut Kusek dan Rist (2004) adalah proses rutin mengumpulkan

data dan informasi untuk melihat perkembangan pelaksanaan program serta kemajuan hasil yang dicapai. Sedangkan evaluasi merupakan proses penilaian yang sistematis dan objektif terhadap suatu program atau kebijakan yang sedang berjalan atau telah selesai, dengan tujuan untuk menilai relevansi, efektivitas, efisiensi, dampak, serta keberlanjutannya. Setiap kegiatan pelatihan harus diakhiri dengan evaluasi, agar proses pelatihan dapat dinyatakan komprehensif. Manajemen Pelatihan memiliki ciri khasnya sendiri, dan evaluasi difokuskan untuk mengawasi pencapaian tujuan. Melalui evaluasi, dapat diukur efektivitas dan efisiensi kegiatan pelatihan yang telah dilaksanakan, meliputi Evaluasi kurikulum, paket instruksi, tenaga pendidik, tenaga kependidikan dan pelatihan, peserta diklat, alins/alongins, metode pengajaran evaluasi hasil belajar, fasilitas pendidikan dan pelatihan dan anggaran. Evaluasi juga dilaksanakan untuk menemukan bagian mana dari suatu Diklat yang berhasil mencapai tujuan atau kurang berhasil, sehingga dapat dibuat langkah-langkah perbaikan yang diperlukan untuk meningkatkan mutu Diklat pada masa mendatang.

Sistem *monitoring* dan evaluasi yang

dilakukan pada kegiatan ini menggunakan cara pengawasan langsung maupun tidak langsung. *Monitoring* yang dilakukan melalui pengawasan langsung seperti dengan observasi lapangan serta keterlibatan aktif pelatih, pengajar maupun instruktur pada saat kegiatan berlangsung. Sementara itu, pengawasan tidak langsung dapat dilakukan melalui laporan tertulis, rekaman hasil belajar, serta kuesioner dengan responden Pusdiklat Bela Negara BPSDM Han Kemhan sebanyak 71 orang terdiri dari putra 28 dan 43 putri. Berdasarkan hasil pemantauan Terhadap c, yang dilaksanakan di Pusdiklat Bela Negara Badiklat Kemhan dapat disimpulkan bahwa Diklat sudah sesuai dengan yang direncanakan dengan hasil peserta sangat antusias, semangat, serta memiliki jiwa Nasionalisme dan Patriotisme yang Tinggi. Kombinasi antara kedua pendekatan tersebut memberikan gambaran komprehensif mengenai kualitas pelaksanaan program, mengidentifikasi permasalahan yang muncul, serta menjadi dasar dalam perumusan langkah perbaikan berkelanjutan untuk peningkatan mutu pendidikan dan pelatihan.

Adapun data hasil evaluasi yang telah dilakukan dapat dilihat dalam tabel 1 di bawah ini:

Tabel 1. Hasil Evaluasi terhadap Pelatihan Pembinaan Kesadaran Bela Negara Lingkup Pekerjaan bagi ASN Deputi Bidang Tata Lingkungan dan Sumber Daya Alam Berkelanjutan KLH/BPLH Tahun 2025

Aspek yang Dinilai	Sangat Puas (%)	Puas (%)	Cukup Memuaskan (%)	Kurang Puas (%)	Tidak Puas (%)
Materi Diklat	55,0	40,0	5,0	0,0	0,0
Metode Penyampaian	52,0	42,5	5,5	0,0	0,0
Fasilitator/Pengajar	57,0	39,0	4,0	0,0	0,0
Sarana & Prasarana	48,0	45,0	5,0	2,0	0,0
Dampak terhadap Pemahaman Bela Negara	60,0	38,0	2,0	0,0	0,0
Perubahan Karakter/Nilai Kebangsaan	58,0	40,0	2,0	0,0	0,0

Sumber: Laporan Evaluasi Diklat Pembinaan Kesadaran Bela Negara Lingkup Pekerjaan bagi ASN Deputi Bidang Tata Lingkungan dan Sumber Daya Alam Berkelanjutan KLH/BPLH Tahun 2025.

Berdasarkan hasil *monitoring* dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan ruang kelas, secara umum seluruh peserta Pelatihan menunjukkan antusiasme yang tinggi dalam menerima materi yang disampaikan. Materi yang diberikan mendapatkan apresiasi positif dari peserta, khususnya dalam meningkatkan pemahaman tentang Bela Negara dan mendorong perubahan karakter yang selaras dengan nilai-nilai kebangsaan. Sesuai dengan tujuan dan sasaran Pelatihan PKBN Lingkup Pekerjaan bagi Aparatur Sipil Negara Deputy Bidang Tata Lingkungan dan Sumber Daya Alam Berkelanjutan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Tahun 2025 yang akan dicapai, maka metode pembelajaran yang digunakan yaitu metode pendekatan pembelajaran klasikal/tatap muka secara andragogi, yang mana dalam metode ini peserta dipacu untuk berpartisipasi secara aktif dan saling asah, asih, dan asuh diantara sesama peserta maupun dengan pengajar (Widyaiswara). Hal ini tercermin dari partisipasi aktif peserta dalam sesi diskusi, di mana seluruh peserta terlibat secara aktif dalam bertukar pandangan dan pengalaman, sehingga menciptakan suasana belajar yang interaktif dan konstruktif.

Selain kegiatan ruang kelas, hasil *monitoring* dan evaluasi menunjukkan bahwa aspek kepelatihan juga berjalan dengan baik dan mengalami peningkatan dibandingkan periode sebelumnya, yang ditandai dengan pelaksanaan kegiatan yang lebih tertib serta adanya pengawasan melekat pada setiap sesi Pelatihan. Peserta dididik dan dilatih melalui Kegiatan Baris-Berbaris, Keprotokolan, Keterampilan Bela Negara (*Outbound*), Caraka Malam, dan Api Semangat Bela Negara (ASBN).

Salah satu metode yang paling tepat untuk menanamkan nilai-nilai bela negara adalah melalui kegiatan baris-berbaris yang menjadi salah satu materi pada Pelatihan PKBN. Materi baris-berbaris merupakan salah satu komponen penting dalam pelatihan, yang bertujuan untuk membentuk disiplin, koordinasi, dan kerjasama antar peserta. Latihan baris-berbaris tidak hanya menekankan pada ketepatan gerakan fisik, melainkan juga mengajarkan peserta tentang kedisiplinan waktu, kerapian, dan kepatuhan terhadap perintah. Dalam pelaksanaan pelatihan,

peserta diarahkan untuk memahami posisi, langkah, dan komando dengan benar, sehingga terbentuk kesadaran kolektif dan kemampuan bertindak secara teratur dalam berbagai situasi. Pedoman baris-berbaris ini menjadi landasan bagi para peserta untuk menanamkan nilai-nilai bela negara, seperti tanggung jawab, solidaritas, dan semangat kebersamaan yang dapat diterapkan baik dalam konteks militer maupun kehidupan sehari-hari.

Sesuai UU RI Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan, dalam Pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan atau masyarakat, sebagai bekal peserta dalam pembentukan sikap dan nilai bela negara seperti rasa hormat terhadap simbol negara, tanggung jawab, solidaritas, dan kemampuan bekerjasama dalam pelaksanaan kegiatan formal maupun nonformal.

Kegiatan Keterampilan Bela Negara (*Outbound*) merupakan metode pelatihan terbaik dan menjadi kegiatan wajib pada Pelatihan PKBN dalam rangka menumbuhkembangkan semangat kebersamaan di antara peserta Pelatihan di lingkungan Pusdiklat Bela Negara BPSDM Han Kemhan RI. Kegiatan *Outbound* ini dilakukan dengan metode pembelajaran demonstrasi dan praktik di lapangan. Faktor keamanan menjadi skala prioritas utama dalam penyelenggaraan kegiatan ini. Melalui kegiatan *Outbound* diharapkan menciptakan interaksi antar peserta sehingga terbangun suasana yang kondusif, semangat kebersamaan dan terbentuk kerjasama yang baik selama proses pembelajaran. Kegiatan ini menjadi salah satu teknik berinteraksi yang paling efektif antar peserta dengan karakter yang beraneka ragam. Adapun tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan *Outbound* yaitu terwujudnya kesadaran bela negara bagi peserta dari Nilai-nilai Dasar Bela Negara yang didapat dalam rangka mendukung Sistem Pertahanan Semesta dan dapat diimplementasikan dalam kehidupan di masyarakat maupun di lingkungan pekerjaan khususnya di Kementerian Lingkungan Hidup.

Selanjutnya yaitu kegiatan Caraka Malam,

dimana peserta berperan sebagai seorang pengirim berita rahasia yang harus menghadapi berbagai ancaman, gangguan, hambatan, rintangan, dan tantangan. Dengan mengikuti Caraka Malam ini diharapkan peserta mampu mengembangkan pengetahuan, sikap dan perilaku bela negara, mengeksplorasi kecerdasan intelektual (IQ), kecerdasan spiritual (SQ), kecerdasan emosional (EQ) dan kecerdasan dalam bertahan hidup atau mengatasi kesulitan (AQ) yang dimilikinya serta menumbuhkembangkan kewaspadaan dini, berupa kepedulian, kepekaan, kesiapsiagaan dan antisipasi dalam menghadapi setiap potensi ancaman dan dampak negatif di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan.

Dalam proses belajar mengajar Pelatihan Bela Negara, mata Diklat terakhir sebelum upacara penutupan adalah kegiatan Api Semangat Bela Negara (ASBN), berupa acara penyalaan api unggun yang dirancang sedemikian rupa sebagai sarana internalisasi nilai-nilai dasar bela negara kepada para peserta yang akan dikukuhkan sebagai Kader Bela Negara pada saat upacara penutupan Pelatihan. Acara ASBN ini merupakan suatu acara dengan metode *energizers* sebagai sarana internalisasi nilai-nilai dasar bela negara guna membangkitkan semangat peserta sebagai calon Kader Bela Negara dalam melanjutkan pengabdianya kepada bangsa dan negara.

Pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan (Evgar) telah dilakukan secara sistematis sebagai tolok ukur untuk menilai efektivitas dan pencapaian hasil dari seluruh rangkaian kegiatan pelatihan. Adapun terkait waktu pelaksanaan pelatihan yang masih terbatas, panitia pelaksana telah mengoptimalkan hal tersebut melalui pelaksanaan kegiatan Bimbingan dan Pengasuhan (Bimsuh). Kegiatan Pembimbingan diberikan selama jam pelajaran, dan kegiatan Pengasuhan diberikan secara terus menerus oleh Ketua Pelaksana dan Pelatih. Teknik bimbingan dan pengasuhan tersebut melalui wawancara, konseling, bimbingan dan pemberian tugas-tugas serta pengasuhan di luar kelas yang meliputi kepemimpinan, keteladanan, keterampilan dan pembiasaan-pembiasaan. Hal tersebut bertujuan untuk memastikan seluruh materi dan tujuan pembelajaran dapat tersampaikan secara maksimal.

Pelaksanaan Pelatihan dalam rangkaian Serdiklat merupakan bagian penting dalam

membentuk karakter dan kompetensi peserta, terutama dalam konteks Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN). Namun, hasil evaluasi dan garapan (Evgar) terhadap kegiatan ini menunjukkan masih adanya sejumlah catatan yang perlu menjadi perhatian bersama. Salah satu temuan yang cukup mencolok adalah kecenderungan sebagian pelatih membawa idealisme masing-masing saat menyampaikan materi. Hal ini menyebabkan ketidaksamaan arahan yang diterima peserta, yang pada akhirnya dapat memengaruhi konsistensi pemahaman terhadap nilai-nilai dasar yang ingin ditanamkan. Selain itu, aspek non-akademis seperti kelengkapan dan kualitas seragam siswa (kaporlap) juga masih menjadi perhatian. Beberapa peserta mengeluhkan perlengkapan yang diterima, baik dari segi mutu maupun kelengkapannya. Untuk menjawab berbagai catatan tersebut, diperlukan sejumlah langkah konkret sebagai bentuk tindak lanjut dan upaya perbaikan berkelanjutan.

Pertama, penting untuk dilakukan *briefing* rutin kepada seluruh penyelenggara dan pelatih sebelum pelatihan dimulai. *Briefing* ini tidak hanya sebagai ajang koordinasi teknis, tetapi juga sebagai sarana penyamaan persepsi agar pelaksanaan pelatihan berjalan dengan keseragaman arah dan tujuan. Selain itu, *briefing* juga berfungsi sebagai sarana untuk menyampaikan informasi terkini, memperjelas peran dan tanggung jawab masing-masing pihak, serta mengidentifikasi potensi akan hambatan yang mungkin muncul selama pelatihan. Dengan demikian, *briefing* dapat membantu menciptakan lingkungan pelatihan yang terstruktur, efisien, dan efektif. *Briefing* yang dilakukan secara rutin juga dapat memperkuat komunikasi antar anggota tim pelatih dan memastikan bahwa semua pihak memiliki pemahaman yang sama mengenai tujuan dan metode pelatihan yang dilaksanakan, sebagai kunci keberhasilan pelaksanaan program.

Kedua, perlu adanya pengecekan menyeluruh terhadap perlengkapan (kaporlap) yang akan diserahkan kepada peserta. Kualitas dan kuantitas harus dipastikan sesuai standar, demi menciptakan rasa nyaman selama kegiatan berlangsung. Terakhir, perhatian juga perlu diberikan pada aspek fasilitas pendidikan dan pelatihan (Fasdik). Fasilitas pendidikan dan pelatihan merupakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk menunjang efektivitas proses

pendidikan dan pelatihan, sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai secara optimal (Mulyasa, 2009). Suyanto (2014) menekankan bahwa fasilitas pendidikan dan pelatihan yang memadai dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses pembelajaran. Fasilitas yang baik tidak hanya mencakup sarana fisik, tetapi juga aspek psikologis yang menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan mendukung. Walaupun hasil dari evaluasi terhadap fasilitas pendidikan dan pelatihan (Fasdik) ternilai **baik**, namun masih terdapat keluhan terkait kapasitas toilet di aula maupun kebersihan kamar mandi di barak peserta. Selain itu, konektivitas jaringan internet juga perlu diperhatikan guna mempermudah Serdik dalam melaksanakan proses pembelajaran yang lebih baik. Hal ini menjadi indikator penting yang tidak

boleh diabaikan. Kenyamanan lingkungan pelatihan memiliki peran besar dalam mendukung konsentrasi dan semangat belajar peserta selama mengikuti pelatihan.

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, diharapkan penyelenggaraan Serdiklat ke depan dapat berjalan lebih optimal, tidak hanya dari sisi materi, tetapi juga dalam hal kenyamanan, keteraturan, dan keseragaman penyampaian. Hal ini penting agar tujuan strategis pelatihan dalam membentuk SDM yang unggul dan berkarakter bela negara benar-benar dapat tercapai secara menyeluruh.

Adapun data hasil evaluasi yang telah dilakukan dapat dilihat dalam tabel 2 di bawah ini:

Tabel 2. Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pelatihan Pembinaan Kesadaran Bela Negara Lingkup Pekerjaan bagi ASN Deputy Bidang Tata Lingkungan dan Sumber Daya Alam Berkelanjutan KLH/BPLH Tahun 2025

Waktu	Siswa	Tingkat Kepuasan %				
		Sangat Memuaskan	Memuaskan	Cukup Memuaskan	Kurang Memuaskan	Tidak Memuaskan
5 hari	71 siswa	45,7	42,4	8,9	2,6	0,4

Sumber: Laporan Evaluasi Diklat Pembinaan Kesadaran Bela Negara Lingkup Pekerjaan bagi ASN Deputy Bidang Tata Lingkungan dan Sumber Daya Alam Berkelanjutan KLH/BPLH Tahun 2025

Meskipun masih terdapat beberapa catatan yang perlu diperbaiki, secara keseluruhan penyelenggaraan pelatihan mampu memberikan pengalaman belajar yang positif dan bermakna bagi peserta. Hal ini tercermin dari tingkat kepuasan peserta terhadap penyelenggaraan Monitoring dan Evaluasi Pelatihan Pembinaan Kesadaran Bela Negara Lingkup Pekerjaan bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Lingkungan Hidup yang menunjukkan hasil **sangat memuaskan**, baik dari aspek materi, metode penyampaian, maupun fasilitasi kegiatan. Tingkat kepuasan peserta terhadap penyelenggaraan Monitoring dan Evaluasi Pelatihan Pembinaan Kesadaran Bela Negara Lingkup Pekerjaan Bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Lingkungan Hidup menunjukkan hasil yang **sangat**

memuaskan, baik dari aspek materi, metode penyampaian, maupun fasilitasi kegiatan. Selama 5 hari pelaksanaan pelatihan, peserta menilai bahwa program ini berhasil meningkatkan pemahaman mereka terhadap nilai-nilai dasar bela negara serta relevansinya dalam mendukung tugas dan fungsi sebagai ASN di bidang lingkungan hidup. Evaluasi menunjukkan bahwa peserta merasa mendapatkan manfaat nyata, baik dari sisi penguatan karakter kebangsaan maupun motivasi dalam menjalankan peran sebagai pelayan publik yang berintegritas dan cinta tanah air.

KESIMPULAN

Penyelenggaraan Pelatihan Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN) Lingkup Pekerjaan bagi ASN Kementerian Lingkungan Hidup Tahun 2025, yang dilaksanakan

berdasarkan Keputusan Kabadiklat Kemhan Nomor Kep/769/XII/2024 dan Surat Permohonan Koordinator Sekretariat Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, secara umum berjalan dengan **sangat memuaskan**. Monitoring dan evaluasi yang dilakukan pada pelaksanaan Pelatihan Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN), khususnya pada sesi ruang kelas sebagai komponen utama, menjadi instrumen penting dalam menjamin mutu dan efektivitas program. Dengan mengacu pada pendekatan Kusek dan Rist (2004), *monitoring* dilakukan secara rutin untuk memantau perkembangan pelaksanaan, sementara evaluasi dilaksanakan secara sistematis guna menilai relevansi, efektivitas, efisiensi, dampak, dan keberlanjutan pelatihan.

Pelaksanaan *monitoring* menggunakan metode pengawasan langsung melalui observasi lapangan dan keterlibatan aktif pelatih serta instruktur, dan pengawasan tidak langsung melalui dokumentasi, laporan, serta data hasil belajar. Evaluasi akhir menjadi bagian penting dalam menilai capaian tujuan pelatihan secara menyeluruh. Melalui sistem monitoring dan evaluasi ini, kualitas pelatihan dapat diukur secara objektif, sekaligus menjadi dasar dalam penyusunan langkah-langkah perbaikan berkelanjutan untuk memastikan bahwa pelatihan berjalan efektif, efisien, dan sesuai dengan target pembentukan karakter ASN berjiwa bela negara. Kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan arah kebijakan dan prioritas strategis penguatan nilai dasar bela negara. Hasil Monitoring dan Evaluasi menunjukkan bahwa peserta mengikuti kegiatan dengan antusias, materi diterima dengan baik, dan diskusi berlangsung aktif. Kualitas kepelatihan mengalami peningkatan, serta pelaksanaan evaluasi (Evgar) berjalan sistematis. Meskipun masih terdapat beberapa catatan terkait keseragaman arahan pelatih, perlengkapan (kaporlap), dan fasilitas pendukung, upaya tindak lanjut telah disiapkan untuk perbaikan berkelanjutan. Dengan demikian, pelatihan ini telah memberikan kontribusi positif dalam membentuk ASN yang profesional, berintegritas, serta memiliki karakter bela negara yang kuat untuk mendukung tugas dan fungsi di bidang lingkungan hidup.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmadi, A. (2020). *Filsafat Nilai dan Aplikasinya Berbasis Spirit Membangun Karakter*. Depok: Rajawali Pers.
- Badudu, R. (2019). *Character Excellence: Jilid 1 Mengembangkan Karakter Pribadi*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- BPSDM Pertahanan Kemhan. (2025). *Evaluasi penyelenggaraan pelatihan PKBN lingkup pekerjaan bagi ASN Kementerian Lingkungan Hidup tahun 2025 di Pusdiklat Bela Negara*. Jakarta: Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.
- Hanum, N. D., Dewi, C. N. A., & Agustin, L. M. (2022). Peran Strategis Pendidikan Bela Negara dalam Penguatan Ketahanan Nasional di Era Disrupsi dan Globalisasi. *International Proceedings the Journal of Community Service (IPJCS)*, 63-64.
- Kaswan. (2021). *Organisasi: Struktur, Perilaku, Proses, dan Hasil*. Bandung: Penerbit Yrama Widya.
- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2021). *Rencana Induk Pembinaan Kesadaran Bela Negara 2021–2025*. Jakarta: Kementerian Pertahanan RI.
- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2025). *Evaluasi Penyelenggaraan Pelatihan PKBN Lingkup Pekerjaan Bagi ASN Kementerian Lingkungan Hidup Tahun 2025 di Pusdiklat Bela Negara BPSDM Pertahanan Kemhan*. Jakarta: Kementerian Pertahanan RI.
- Kusek, J. Z., & Rist, R. C. (2004). *Ten steps to a results-based monitoring and evaluation system: A handbook for development practitioners*. Washington, DC: The World Bank.
- Mulyasa, E. (2009). *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Republik Indonesia. 2002. Undang-Undang No.3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2002. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. 2003. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78. Jakarta: Sekretariat Negara.

- Republik Indonesia. 2014. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. 2016. Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembinaan Kesadaran Bela Negara. Jakarta: Kementerian Pertahanan.
- Republik Indonesia. 2018. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Bela Negara. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. 2019. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 175. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. 2020. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 70. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. 2022. Keputusan Presiden Nomor 115 Tahun 2022 tentang Rencana Induk Pembinaan Kesadaran Bela Negara Tahun 2020–2044. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Sarwono, S. W. (2022). *Pengantar Psikologi Umum*. Depok: Rajawali Pers.
- Soedarsono, S. (2009). *Membangun Kembali Jati Diri Bangsa*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Suyanto, S. (2014). *Manajemen Pendidikan dan Pelatihan*. Jakarta: Rineka Cipta.